

SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

SALMINA W. GINTING

NAMA LAIN

- PARTISIPASI
- KEMITRAAN
- PARTNERSHIP
- ADVOCATY PLANNING
- COMMUNITY PLANNING
- GOTONG ROYONG
- PERAN SERTA MASYRAKAT

Pandangan yang salah

masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Padahal, sifat dasarnya:

- mengutip Parwoto (1997) – berorientasi pada pemecahan masalah, berjangka panjang, prinsip keterbukaan dan saling memperhatikan, kesetaraan, dan saling ketergantungan.

Report of United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II)

Istambul Turkey 3-14 Juni 1996, konsep ini disebut dengan '*partnership*' dan '*participation*':

We adopt the enabling strategy and the principles of partnership and participation as the most democratic and effective approach for the realization of our commitments...We shall also increase our cooperation with parliamentarians, the private sector, labour unions and non-governmental and other civil society organizations with due respect for their autonomy....(UNCHS, 1996:9)

PENDAPAT PAKAR

- ● Canter (1977)

Proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan. Secara sederhana Canter mendefinisikan sebagai **feed-forward information** (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan **feedback information** (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

- Goulet (1989)

suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai "paspor" mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

- ● Cormick (1979)

membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat **konsultatif** dan bersifat **kemitraan**.

Konsultatif: antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut.

Kemitraan: pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

- ● **Wingert (1979)**

merinci peran serta masyarakat sebagai berikut :

- *Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan*

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

- *Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi*

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan **dukungan masyarakat** (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

- *Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi*

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

- *Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi*

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "**mengobati**" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

- ● Arnstein (1969)

menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari **kekuatan rakyat** (citizen participation is citizen power). Dimana terjadi pembagian kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai (the have-not citizens) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak.

Singkat kata, peran serta masyarakat - menurut Arnstein - *adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.*

Dari Indonesia:

Sudaryono (1997) menulis kemitraan hendaknya dapat memberi ruang bagi mekanisme operasional distribusi tanggung jawab yang melibatkan banyak pihak, semacam '*sharing risk*'.

Marco Kusumawijaya (2003) menulis partisipasi sosial merupakan suatu syarat agar apa yang dihasilkan sesuai dengan kehendak masyarakat. **Konsep** partisipasi sosial adalah bekerjasama, bahwa setiap orang menyumbang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.

MENGAPA PENTING?

1. Visi pembangunan (Indonesia) tidak lagi bertitikberat kepada pemerintah semata tetapi juga kepada masyarakat. Sumbu yang tadinya mengarah kepada *state* perlahan tetapi pasti bergeser ke arah *society*, juga dari *top-bottom* menjadi *bottom-up*. Pergeseran ini membuat masyarakat memainkan peranan penting dalam menentukan apa yang perlu dan tidak perlu dalam pembangunan kemasyarakatan.

2. Masalah pembangunan dan pemberdayaan (empowering) masyarakat sudah semakin kompleks dan rumit sehingga tidak ada satu pihak pun (pemerintah-masyarakat-swasta-dll) dapat menyelesaikan masalah tersebut sendirian tanpa bantuan pihak lain.

3. Keterbatasan sumber daya, baik karena memang langka maupun karena kurang baik pendistribusiannya

Kemitraan dapat dilakukan melalui:

- Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat
- Kemitraan antara pemerintah dengan swasta
- Pengembangan jenis sumber-sumber daerah atas dasar prinsip kemitraan

Kemitraan antara pemerintah dan swasta

- Ekonomi tradisional yaitu gotong royong (swadana, swakarya, swakelola)
- Ekonomi modern yaitu penyertaan modal masyarakat ke dalam suatu proyek melalui Pasar Modal (obligasi, saham)

Bentuknya:

- **PSP (private sector participation)**

Non capital intensive = investasi dilakukan oleh pemerintah. Contoh PSP: service contract, management contract

- **PPP (public private partnership)**

Capital intensive = investasi dilakukan oleh swasta dan pemerintah, atau pemerintah saja. Contoh PPP: Built Operate Transfer (BOT), Built Operate Own (BOO), concession (konsesi)

The background is a dark blue gradient. A thin, light blue curved line starts from the top left and curves towards the right. A light blue wedge-shaped area is located on the right side, pointing towards the center.

Kasus-kasus

Machizukuri (Jepang)

- "Machizukuri" adalah istilah dalam bahasa Jepang yang terdiri dari 2 kata yakni "machi" (kota) dan "zukuri" (membangun, berkreasi)
- lebih menekankan pada kegiatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan wilayahnya (*community participation*). Ini adalah model pembangunan tengah-tengah, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai intinya (*community-based planning*).

- Dari data di Kantor Kabinet (2006) diketahui juga bahwa sejak tahun 1998 hingga 31 Maret 2006 lebih dari 15 ribu NGO terdaftar di Jepang, dan hampir seperlimanya (lebih dari 2500 NGO) adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam kegiatan "machizukuri".

- Dalam praktiknya "machizukuri" ini mencakup dalam 3 (tiga) sektor kehidupan masyarakat, yaitu: **pendidikan sosial, pembangunan (kembali) komunitas lokal, dan pembangunan lingkungan.**
- Pendidikan sosial (*social education*) ini bisa berujud penyebaran informasi melalui komunitas, misalnya tema-tema tentang masyarakat manula, proses penyebaran informasi, proteksi atau penyelamatan lingkungan, dan lainnya.

- pembangunan kembali komunitas lokal (*local community re-development*) untuk menangani program-program yang akan dilaksanakan. Beberapa di antaranya akan membentuk pula semacam dewan "machizukuri" (*machizukuri kyogikai*) yang berisi perwakilan-perwakilan masyarakat untuk mengefisiensikan pengambilan kebijakan.
- pembangunan lingkungan (*environmental development*) yang oleh masyarakat awam sering menjadi inti dari definisi "machizukuri" itu sendiri.

- Model ini disinyalir oleh banyak penganalisis (misalnya Koizumi, H. 2004) sebagai ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengontrol perkembangan daerah dan mencoba membaginya kepada masyarakat.
- nyata terlihat pada tahun 1992 ketika peraturan tahun 1968 itu direvisi dengan memasukkan dasar perencanaan kota (*the basic policy of city planning*) atau lebih dikenal dengan "*the city masterplan*" yang memberi peran lebih besar pada pemerintah daerah (dan masyarakatnya).

- *Contoh: Kobe City Machizukuri Ordinance* (1982 dan 1995), *Setagaya Machizukuri Ordinance* (1982, direvisi tahun 1995), *Toyonaka Machizukuri Ordinance* (1994), dan *Kamakura Machizukuri Ordinance* (1997).
- *Beberapa keunikan:* warga Setagaya berinisiatif untuk berdiri menjadi sebuah kecamatan sendiri atau warga Kamakura menghasilkan konsep hidup berdampingan dengan (kawasan) "sejarah". Warga Kobe pada saat sebelum gempa (1982) dan hasil adaptasi pada rencana baru setelah gempa (1995).

- gerakan "machizukuri" diaktualisasikan ke dalam 2 (dua) jenis program, yakni "soft-program" dan "hard-program".
- *Soft program* biasanya program yang berisi kegiatan masyarakat setempat untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada. Mis. kursus sampai festival atau usaha kebugaran warga sampai menyelenggarakan pasar bulanan
- Sedang *hard program* adalah program yang bertautan dengan penambahan, pengadaan atau juga penyesuaian, yang biasanya berujud proyek-proyek (pembangunan) fisik.

- aksi-aksi "bottom up" dari gerakan "machizukuri" telah banyak membuahkan hasil, misalnya pada penyusunan rencana induk (*master plan*) area, pembangunan jejaring hijau (*green network*), usaha perbaikan taman-taman setempat, kritik terhadap pembangunan bangunan tinggi yang merugikan wilayah tertentu mereka, maupun perlindungan terhadap tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah (*historical area*).

Contoh lain

- Model Pembangunan Perumahan di Gunung Ilir, Balikpapan
- Model Pembangunan Perumahan di Mojolaban, Solo
- Model Pembangunan Perumahan di Cibangkong, Bandung